

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat dikatakan berkembang apabila daerah tersebut mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas yang tinggi dan memiliki penerapan value for money yang benar.

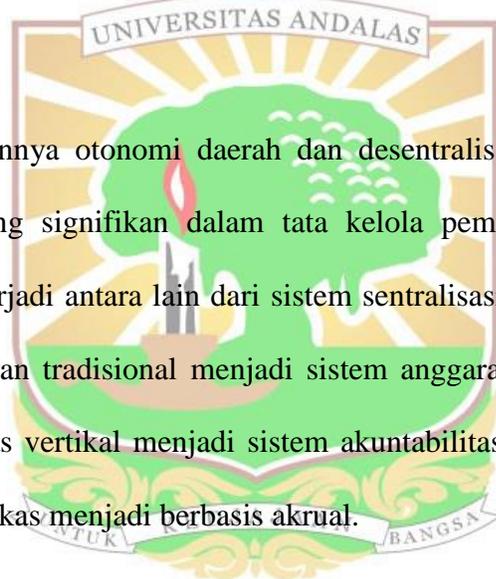
Pada tanggal 1 Januari 2001 telah dilakukan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan dan desentralisasi keuangan sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di revisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mardiasmo (2002:8), otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional

artinya, perlimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat daerah.

Otonomi daerah diharapkan dapat memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, efektif dan efisien.

Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, dari sistem akuntabilitas vertikal menjadi sistem akuntabilitas horizontal, dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual.



Peningkatan efisiensi dan efektivitas di dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi keuangan negara dapat dilihat melalui penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara

keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2011). Tujuan dari pelaporan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna di dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah merupakan pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang diberi kepercayaan untuk dapat menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam

pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintah. Anggaran mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Analisis kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk melihat apakah pemerintah telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik, hal ini dapat diukur dengan melakukan perhitungan atas laporan keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari periode sekarang dengan periode sebelumnya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten atau kota masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Hariadi 2014). Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Kota Padang salah satu kota yang diberikan kebijakan Otonomi Daerah yang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan pengkajian secara mendalam untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah daerah dan

apakah pemerintah daerah telah berhasil atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

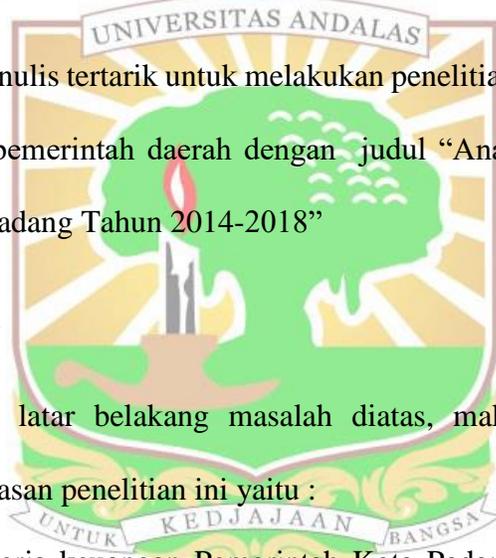
Pada penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kinerja yaitu analisis varians pendapatan daerah dan analisis rasio keuangan dimana analisis rasio keuangan ini terdiri dari rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, dan analisis keserasian belanja daerah.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2018”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan menjadi topik bahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran 2014-2018 dengan menggunakan analisis varians pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, dan analisis keserasian belanja daerah?
2. Bagaimana perbandingan kinerja Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2014-2018 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari



analisis varians pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, dan analisis keserasian belanja daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran 2014-2018 dengan menggunakan analisis varians pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, dan analisis keserasian belanja daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai oleh pihak-pihak terkait di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat untuk penulis yaitu penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang.



2. Bagi Pemerintah Kota Padang

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ke depan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk melihat bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang yang telah diteliti oleh penulis.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis kinerja keuangan pendapatan Pemerintah Kota Padang berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2014-2018.



1.6. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang sedang dibahas yaitu teori keuangan daerah dan analisis kinerja keuangan daerah; pengukuran kinerja pemerintah daerah; penelitian terdahulu; dan kerangka teori.

BAB III : Bab ini memberikan penjelasan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap pengujian yang digunakan.

BAB IV : Pada bab ini akan dibahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan hasil dari pengolahan data tersebut dimana hasil ini adalah jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB V : Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

